ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA PERKUMPULAN PEDAGANG PASAR PAGAR DEWA (P4D) DENGAN KOPERASI BANGUN WIJAYA (Studi putusan No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl)

Sundari Intan P.S^{a1}, Betra Sarianti^{b2}, Hendri Padmi^{c3}, Riri Trimayasari^{d4}

^{a1} Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

A B S T R A K

Keywords:

Perbuatan melawan hukum, pedagang pengelola pasar

Perkara perdata merupakan perkara mengenai perselisihan antara kepentingan perorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan. Perkara perdata dapat terjadi karena dua hal yaitu karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah: (1). untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perbuatan melawan hukum dalam perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl antara Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D) dengan Koperasi Bangun Wijaya (2). untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat, mempelajari dan menelaah bahan hukum primer dan skunder serta pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: (1). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl termasuk dalam perbuatan melawan hukum adalah berdasarkan pasal 1365 KUHper yang menyatakan “Bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian untuk menggantikan kerugian tersebut” (2). Implementasi putusan perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl ini berdasarkan kenyataan di masyarakat ada yang terlaksana dan ada yang tidak terlaksana, dalam hal pendataan ulang guna untuk menerbitkan Surat Keterangan Menempati (SKM) yang baru tergugat sebagai pengelola pasar sudah menjalankan namun ada penolakan dari pedagang akibat besarnya biaya yang diminta dan untuk penagihan uang sewa tergugat tidak menjalankan isi putusan melainkan tergugat tetap menagih uang sewa dari tahun sebelum tergugat Kembali menjadi pengelola pasar.

ABSTRACT

Keywords:

Acts against the law,
traders
market manager

Civil cases are cases involving disputes between individual interests or between the interests of a government agency and the interests of individuals. Civil cases can occur due to two things, namely due to breach of contract or unlawful acts. The author's objectives in this research are: (1). to find out the legal considerations of the Panel of Judges in deciding against the law in case No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl between the Pagar Dewa Market Traders Association (P4D) and the Bangun Wijaya Cooperative (2). to find out how to implement the decision in case No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl. This type of research is normative juridical using qualitative methods. Data collection was carried out by viewing, studying and reviewing primary and secondary legal materials as well as case approaches. The results of this research are: (1). The judge's consideration in deciding case No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl, including an unlawful act, was based on article 1365 of the Criminal Code which states "That every act that violates the law and brings harm to another person, requires the person who caused the loss to compensate such loss" (2). The implementation of the decision in case No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl is based on the fact that in the community there are things that are implemented and there are things that are not implemented, in terms of re-registration in order to issue a Certificate of Occupancy (SKM) which the defendant as the market manager has implemented. However, there was resistance from traders due to the large fees requested and for collecting rent, the defendant did not carry out the contents of the decision, but the defendant continued to collect rent from the year before the defendant returned as market manager.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkara perdata merupakan perkara mengenai perselisihan antara kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan. misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa menyewa, pembagian waris, dan hak milik. Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata, Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum atau karena wanprestasi. Dalam Pasal 1365 KUHPerduta perbuatan melawan hukum yaitu: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Kerugian yang timbul itu dapat berupa kerugian materil, misalnya kerusakan atas barang atau berupa kerugian imaterial, misalnya kehilangan hak menikmati barang atau pencemaran nama baik. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian. Pada perkara perdata, inisiatif berperkara datang dari pihak yang dirugikan. Karena itu, pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian berupa pemulihan, penggantian kerugian, dan menghentikan perbuatan yang merugikan itu.¹

Seperti salah satu kasus yang terjadi di Pasar Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang dikaji berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena adanya pertentangan antara Kelompok Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D) dengan Koperasi Bangun Wijaya sebagai pengelola Pasar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mahkamah Agung RI No.2925 K/Pdt/2017. Dimana kronologis permasalahannya diawali karena adanya penyegelan kios yang di lakukan oleh pihak pengelola Pasar, penyegelan kios ini dilakukan karena sebagian dari para pedagang mengalami penunggakan uang sewa dan ada juga yang tidak memiliki atau tidak memperpanjang surat keterangan menempati (SKM) yang di terbitkan oleh Koperasi Bangun Wijaya sebagai pengelola. Padahal sudah ada pemberitahuan kepada para pedagang untuk membuat atau memperpanjang SKM akan tetapi Pedagang tidak memenuhi panggilan. Pihak pengelola merasa jika para Pedagang tidak memahami tentang hak

¹Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2008),19-20.

dan kewajiban mereka sebagai Pedagang. Namun pada saat akan dilakukan penyegelan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pedagang sehingga menyebabkan para pedagang merasa kehilangan mata pencaharian dan mengalami kerugian sejak dilakukan penyegelan karena barang dagangan mereka berada di dalam kios tersebut menjadi rusak tidak laku di jual.

Penyegelan kios ini dilakukan sebanyak 2 kali pertama pada tanggal 26 juli 2022 sebanyak tujuh puluh (72 kios) dan yang kedua pada tanggal 13 agustus 2022 sebanyak tiga puluh (30 kios). Namun pada tanggal 13 agustus tersebut tidak hanya terjadi penyegelan kios saja akan tetapi terjadinya aksi premanisme yang dilakukan oleh karyawan koperasi terhadap salah satu pedagang.²

Terhadap kasus penyegelan kios tersebut kelompok Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D) kota Bengkulu telah mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl dengan hasil putusan :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Sebagian
- 2) Menyatakan secara Hukum perbuatan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi menutup/menyegel 25 (dua puluh lima) kios/los pedagang Pasar Pagar Dewa adalah Perbuatan Melawan Hukum
- 3) Memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mendata ulang seluruh pedagang yang berada di Pasar Pagar Dewa;
- 4) Memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghapus uang sewa sebelum tahun 2020 dan memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengambil uang sewa sejak tahun 2020 atau sejak para pedagang menempati Kios, Los, Auning, Pollyng Geat (permanen) serta menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keterangan Menempati (SKM) baru untuk masing-masing pedagang
- 5) Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebinya

Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Perbuatan Melawan Hukum Antara Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D) Dengan Koperasi Bangun Wijaya (Studi Putusan No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl)”**

² <https://bengkulu.tribunnews.com/2022/08/22/kios-pedagang-di-pasar-pagar-dewa> (di akses pada 24 november 2023 pada pukul 20.25 wib)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain.³ data primer mengacu pada sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data yaitu pedagang dan hakim. Sumber data skunder adalah sumber data yang didapatkan dari literatur, artikel, jurnal, situs di internet serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penelitian. Jenis penelitian ini adalah

Yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴

Pembahasan

2.1 Analisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perbuatan melawan hukum dalam perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl antara perkumpulan pedagang pasar pagar dewa (P4D) dengan koperasi Bangun Wijaya

Dalam perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl ini terjadi antara Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu sebagai Penggugat dengan Koperasi Bangun Wijaya sebagai pengelola Pasar/Tergugat. Dimana kronologis permasalahannya karena adanya pertentangan antara Perkumpulan Pedagang Pasar Pagar Dewa (P4D) dengan Koperasi Bangun Wijaya akibat dari penyegelan kios yang dilakukan oleh pihak pengelola Pasar, penyegelan kios ini dilakukan karena sebagian dari para pedagang mengalami penunggakan uang sewa dan ada juga yang tidak memiliki atau tidak

³ Creswell J. W. (2016). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

⁴ (Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.15)

memperpanjang surat keterangan menempati (SKM) yang di terbitkan oleh Koperasi Bangun Wijaya sebagai pengelola Pasar Pagar Dewa padahal sudah ada pemberitahuan tentang pembuatan SKM ini akan tetapi pihak pedagang tidak memenuhi panggilan tersebut.

Pihak pengelola merasa jika para pedagang tidak memahami tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pedagang. Namun pada saat akan dilakukan penyegelan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pedagang sehingga menyebabkan para pedagang merasa kehilangan mata pencaharian dan mengalami kerugian sejak dilakukan penyegelan karena barang dagangan mereka berada di dalam kios tersebut menjadi rusak tidak laku di jual. Penyegelan kios ini dilakukan sebanyak 2 kali pertama pada tanggal 26 juli 2022 sebanyak tujuh puluh dua (72 kios) dan yang kedua pada tanggal 13 agustus 2022 sebanyak tiga puluh (30 kios). Namun pada tanggal 13 agustus tersebut tidak hanya terjadi penyegelan kios saja akan tetapi terjadinya aksi premanisme yang dilakukan oleh karyawan koperasi terhadap salah satu Pedagang Pasar Pagar Dewa.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim pelajari dan teliti gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah jelas menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menutup / menyegel kios / los pedagang Pasar Pagar Dewa adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Telah memenuhi kreteria menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni melanggar hak subyektif orang lain, dimana para pedagang memiliki hak seperti yang telah digariskan dalam Pasal 28a UUD 1945 menyatakan :“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan ditutupnya atau disegel kios / lapak para pedagang tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi para pedagang dan dapat mengancam kehidupan para pedagang yang sehari-hari demi mempertahankan hidup dan kehidupannya diperoleh dengan cara berdagang di Pasar Pagar Dewa.⁵

Berdasarkan hasil analisis penulis bawasannya pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara No.63/Pdt.G/PN Bgl termasuk dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPer tidak tepat karena tidak sesuai dengan isi perjanjian yang terdapat pada surat keterangan

⁵⁵ Opcit.paragraf 4,hal 68

menempati (SKM) dan tidak terpenuhinya asas keadilan bagi para pihak. Dimana penggugat merasa dirugikan akibat penyegelan kios yang dilakukan tergugat sebagai pengelola pasar akan tetapi tergugat juga merasa dirugikan karena penggugat tidak memahami antara hak dan kewajiban mereka, dimana penggugat sudah menyediakan tempat yang artinya tergugat sudah mendapatkan hak mereka sebagai pedagang atau penyewa kios seharusnya tergugat juga menjalankan kewajibannya yaitu membayar sewa dan membuat atau memperpanjang surat SKM yang diterbitkan oleh tergugat sebagai pengelola.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya dalam perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl ini termasuk dalam wanprestasi karena salah satu pihak lalai dalam menjalankan perjanjian dan telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHper, yaitu :

1. Adanya perjanjian
2. Adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan ;
3. Telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan perjanjian.⁶

Dalam suatu perjanjian secara hukum memiliki syarat, menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat-syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut :

1) Cakap Hukum (Kecakapan Hukum)

Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum, yang artinya mereka harus memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum. Secara umum, orang yang dianggap cakap hukum adalah mereka yang telah dewasa (telah mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah) dan tidak berada di bawah pengampuan (tidak dalam keadaan sakit jiwa atau gangguan mental lainnya). Dalam hal ini antara kedua pihak sudah masuk dalam kategori cakap hukum karena antara pihak Penggugat dan tergugat sudah dewasa.

2) Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan (hal tertentu)

Hal ini berarti bahwa apa yang dijanjikan dalam perjanjian harus spesifik dan bisa diidentifikasi dengan jelas, baik itu berupa barang, jasa, atau hal lainnya. Dalam hal ini juga poin-poin ketentuan sewa sudah jelas tertera didalam SKM yang di terbitkan oleh tergugat sebagai pihak pengelola pasar

3) Sebab yang Halal

Sebab atau tujuan dari perjanjian harus halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Perjanjian yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang dilarang hukum tidak sah dan tidak dapat diberlakukan.

4) Kesepakatan Para Pihak

Harus ada kesepakatan atau konsensus antara pihak-pihak yang

⁶ Pasal 1243 KUHPer, unsur-unsur wanprestasi

terlibat dalam perjanjian. Kesepakatan ini harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Kedua belah pihak harus sepakat mengenai isi perjanjian dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini bawasannya dengan adanya SKM yang diterbitkan oleh tergugat (pengelola) artinya sudah ada kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan karena pengugat (pedagang) memegang SKM tersebut.⁷

Keempat syarat ini harus dipenuhi untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan dapat diberlakukan di hadapan hukum. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian tersebut bisa dianggap batal atau tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan syarat perjanjian tersebut antara kedua belah pihak sudah memenuhi kriteria suatu perjanjian hanya saja para pedagang kurang memahami hak dan kewajiban mereka

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., selaku hakim pada tanggal 06 Mei 2024, beliau menjelaskan bahwa dalam perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl, sebelumnya telah dilakukan negosiasi dan mediasi antara kedua belah pihak. Namun, upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga perkara dilanjutkan ke persidangan. Persidangan dalam perkara ini dilakukan sebanyak dua puluh enam kali. Setelah seluruh tahap persidangan selesai hingga mencapai putusan akhir, tidak ada pihak yang mengajukan upaya banding terhadap perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl ini.⁸

2.2 Analisis implementasi putusan perkara No. 63/Pdt.G/2022/PN Bgl tentang perbuatan melawan hukum

Berdasarkan hasil putusan perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl implementasi dalam perkara ini seharusnya, Tergugat harus mendata ulang seluruh pedagang yang ada di Pasar Pagar Dewa dan menerbitkan surat keterangan menempati (SKM) yang baru untuk masing-masing pedagang, Menghapus uang sewa sebelum tahun 2020 serta memerintahkan Tergugat untuk mengambil uang sewa sejak tahun 2020 atau sejak para pedagang menempati kios.

Tapi kenyataan yang terjadi dimasyarakat implementasi berdasarkan hasil putusan dalam perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl ini ada yang diterapkan dan ada yang tidak terapkan sesuai dengan putusan. Salah satu aspek yang telah diterapkan adalah pendataan ulang para pedagang di Pasar Pagi Pagar Dewa oleh pengelola pasar, yaitu Koperasi Bangun Wijaya. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk menerbitkan Surat Keterangan Menetap (SKM) yang baru bagi setiap pedagang.

⁷ Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah suatu perjanjian

⁸ Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim pengadilan negeri Bengkulu, wawancara (06 mei 2024)

Pihak pengelola pasar Koperasi Bangun Wijaya melakukan Pendataan ulang dan menerbitkan SKM yang baru untuk Pedagang Pasar Pagar Dewa yaitu dengan tujuan untuk memastikan bahwa data para pedagang yang tercatat adalah para pedagang yang masih aktif menempati kios dan memastikan bahwa setiap pedagang memiliki lokasi yang sesuai tidak ada yang menempati area secara ilegal atau tanpa izin resmi serta memberikan layanan yang lebih baik kepada para pedagang, seperti perbaikan fasilitas, peningkatan keamanan, dan pengelolaan kebersihan yang lebih efektif. SKM juga dapat membantu mengatur kembali penempatan pedagang agar sesuai dengan rencana pengembangan Pendataan ulang dan penerbitan surat keterangan menempati yang baru adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pasar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, implementasi ini menghadapi kendala signifikan karena para pedagang menolak untuk membuat atau memperpanjang SKM baru yang diterbitkan oleh koperasi Bangun Wijaya. Penolakan ini didasari oleh keberatan atas besarnya biaya yang diminta untuk penerbitan atau perpanjangan SKM tersebut. Menurut keterangan saksi *Afriani* dalam putusan No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl pada waktu mau pergantian SKM sudah ada pemberitahuan kepada para pedagang,⁹

Di sisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu pedagang pasar pagi pagar dewa Kota Bengkulu Ibu **Tiorasi Sihombing** sebagai salah satu pihak penggugat pada 02 April 2024, Pukul 11.26 wib. Ia mengatakan bahwa terdapat ketidakselarasan dalam pelaksanaan putusan terkait penagihan uang sewa. Berdasarkan fakta di lapangan, Koperasi Bangun Wijaya, sebagai pengelola Pasar Pagi Pagar Dewa sejak tahun 2020, tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan isi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengharuskan penagihan uang sewa sesuai periode pengelolaan mereka. Pihak koperasi menagih uang sewa dari para pedagang untuk periode sebelum mereka kembali mulai mengelola pasar, yaitu sejak tahun 2016. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan kebingungan di antara para pedagang, mengingat koperasi baru mengambil alih pengelolaan pasar pada tahun 2020. Praktik ini bertentangan dengan putusan pengadilan yang seharusnya mengatur penagihan sewa sesuai dengan masa pengelolaan yang telah ditetapkan.¹⁰ Alasan penghapusan uang sewa yaitu karena pasar pagar dewa sebelum tahun 2020 dikelola oleh Disprindag kota Bengkulu dan koperasi Kembali menjadi pengelola pasar pagar dewa kota Bengkulu

⁹ Keterangan saksi dalam putusan perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl.paragraf 3 (Hal.84)

¹⁰ Tiora Sihombing, pedagang telur di Pasar Pagi Pagar Dewa.wawancara pada tanggal 02 april 2024.

berdasarkan surat keputusan (SK) Mahkamah Agung RI No.2925 K/Pdt/2017 setelah sebelumnya pernah menjadi pengelola.

Dalam permasalahan ini mencerminkan adanya ketidakefektifan dalam penerapan keputusan hukum di lapangan, yang dapat berdampak negatif pada hubungan antara pengelola pasar dan para pedagang. Para pedagang merasa terbebani dengan biaya tambahan untuk SKM baru serta penagihan sewa yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan, sementara pengelola pasar dihadapkan pada tantangan untuk menegakkan aturan yang sebenarnya ditujukan untuk mengatur dan menertibkan pasar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komunikasi yang lebih baik dan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, agar keputusan pengadilan dapat dilaksanakan secara penuh dan adil, serta dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib dan kondusif bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam menjalankan penerapan putusan pengadilan bawasannya harus ada unsur paksaan dari pihak pengadilan jika salah satu pihak menolak untuk menjalankan hasil putusan, Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) dan Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (“RBg”), ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. *M. Yahya Harahap* dalam bukunya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* menyatakan pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela.¹¹

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan di Kabupaten Lebong terhadap penyelesaian kasus sengketa atau perebutan tanah, maka penulis dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Dalam perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl Hakim menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat termasuk dalam perbuatan melawan hukum dengan adanya penyegelan kios Pedagang Pasar Pagar Dewa Kota yang dilakukan oleh Koperasi Bangun Wijaya sebagai pengelola Pasar. Dasar pertimbangan Hakim dalam menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat termasuk dalam perbuatan melawan hukum dengan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 11

pertimbangan berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Putusan hakim tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan isi perjanjian seharusnya perkara ini termasuk dalam wanprestasi karena salah satu pihak lalai dalam menjalankan perjanjian dan telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPer.

2. Implementasi putusan dalam perkara No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl ini ada yang terlaksana dan ada yang tidak terlaksana. Berdasarkan fakta dilapangan pihak pengelola Pasar sudah melakukan pendataan ulang kepada Pedagang yang ada di Pasar pagi Pagar Dewa dan akan menerbitkan surat keterangan (SKM) yang baru untuk masing-masing pedagang namun para pedagang menolak untuk membuat ataupun memperpanjang SKM baru yang di terbitkan oleh pihak Koperasi Bangun Wijaya karena besarnya biaya yang dimintak. Sedangkan untuk penagihan uang sewa sejak tahun 2020 bahwa pihak tergugat atau pengelola pasar pagi pagar dewa (Koperasi Bangun Wijaya) tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan isi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, melainkan pihak tergugat menagih uang sewa terhadap pedagang dari tahun-tahun sebelumnya terhitung sejak 2016 sedangkan pihak koperasi Kembali mengelola Pasar pagi Pagi Pagar Dewa sejak tahun 2020.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Achmad Ichsan, Hukum Perdata, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta:Rajawali Pers,2007)
- Ali Hamzah, KUHP dan KUHP (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 261
- Budi Untung, Hukum Dan Etika Bisnis, Andi Offset, Yogyakarta, 2012
- Istijabatul Aliyah, pasar tradisional: kebertahanan pasar dalam konstelasi kota(yayasan kita menulis,2020)
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

- N.E Algra, 2003, Kamus Istilah Hukum, Bandung: Bina Cipta,
- Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia,2012)
- Rosa Agustina. Perbuatan Melawan Hukum. Depok : Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003
- Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, (Jakarta: Putra Abadin, 1999)
- Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Sri Redjeki Slamet, TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM: SUATU PERBANDINGAN DENGAN WANPRESTASI, Jurnal Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2,Agustus 2013
- Belshaw, Cyril S., Tukar Menukar di Pasar Tradisional dan Pasar Modern
- EfaLaela Fakhriah,perkembangan penyelesaian sengketa perdata,pustaka UNPAD,2014
- Eitra Rizqi,tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum penggelapan uang nasabah oleh karyawan bank aceh cabang sabang (studi kasus atas PN sabang No.9/Pdt.G/2019/PN.Sby.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,(KUH per) tentang perbuatan melawan hukum dan wanprestasi
- Undang – undang pokok agraria (UUPA) tahun 1960 tentang hak-hak atas tanah
- Undang-undang No.48 tahun 2009,tentang kekuasaan kehakiman
- Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Bengkulu No.63/Pdt.G/2022/PN Bgl